

## Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi

Vikri Andrawan<sup>1</sup> Tina Kartini<sup>2</sup> Risma Nurmilah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Sukabumi

*andrawanvikri@gmail.com<sup>1</sup>, tinakartini386@ummi.ac.id<sup>2</sup>, risma@ummi.ac.id<sup>3</sup>*

### ABSTRACT

*This study aims to evaluate the effectiveness of the implementation of fixed asset accounting systems and procedures at the Trade and Industry Office of Sukabumi Regency. The research method used is a qualitative method with an analytical descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The results showed that the implementation of fixed asset accounting systems and procedures is in accordance with applicable government accounting standards, but there are still some obstacles in its implementation such as lack of training for staff and limited resources. Based on the calculation of the effectiveness ratio using the Dean J. Champion measuring instrument, the effectiveness level reached 88%, which is included in the very effective category. The number of indicators assessed were 11 indicators of fixed asset accounting systems, with 9 indicators met, and 7 indicators of fixed asset accounting procedures, which were all met. Recommendations to improve effectiveness include providing better training for staff, increased resource allocation, and improved management and internal controls.*

**Keywords :** *Effectiveness, Accounting procedures, Fixed assets.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya seperti kurangnya pelatihan bagi staf dan keterbatasan sumber daya. Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas dengan menggunakan alat ukur Dean J. Champion, tingkat efektivitas mencapai 88%, yang termasuk dalam kategori sangat efektif. Jumlah indikator yang dinilai adalah 11 indikator sistem akuntansi aset tetap, dengan 9 indikator terpenuhi, dan 7 indikator prosedur akuntansi aset tetap, yang seluruhnya terpenuhi. Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas termasuk memberikan pelatihan yang lebih baik untuk staf, peningkatan alokasi sumber daya, serta perbaikan manajemen dan pengawasan internal.

**Kata kunci :** *Efektivitas, Prosedur Akuntansi, Aset tetap.*

### PENDAHULUAN

Sistem dan prosedur akuntansi untuk aset tetap sangat penting dalam menghasilkan informasi yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan. Ini tidak terlepas dari kelengkapan dokumen yang menjadi dasar dalam setiap siklus pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Menurut Wahyudin (2014), dalam jurnal (Studi Manajemen & Ekonomi, 2020) aset

ini mencerminkan kekayaan daerah berupa infrastruktur serta sarana dan prasarana daerah. Aset tetap memiliki peran yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan. Ketika pengelolaan aset tetap tidak optimal, dapat menyebabkan tidak efektifnya kegiatan pemerintah dan tidak tercapainya tujuan pemerintah yang diinginkan. Dalam konteks Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), manajemen pengelolaan aset yang diperoleh sangatlah penting untuk memastikan pemanfaatan yang efisien, efektif, dan transparan. Dengan demikian, prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dapat terwujud.

Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta pembaruan dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, telah mengubah paradigma pengelolaan barang milik daerah. Pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa yang dapat dinilai dengan uang mencakup tidak hanya hak dan kewajiban, tetapi juga segala sesuatu yang dapat menjadi milik negara terkait pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik berupa barang maupun uang. Regulasi ini menunjukkan bahwa aset pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan negara (Martini et al., 2019).

Menurut Mulyadi (2016:3), dalam jurnal (Kurniasari, 2019) sistem akuntansi adalah suatu organisasi yang terdiri dari formulir, catatan, dan laporan yang disusun dengan cara tertentu untuk menyediakan informasi keuangan yang diperlukan oleh manajemen. Informasi ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan perusahaan.

Menurut Mardiasmo (2018:134) efektivitas merupakan indikator keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Jika tujuan tersebut tercapai, organisasi tersebut dianggap efektif. Sementara itu, menurut Mahmudi (2013:33), efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, semakin efektiflah organisasi, program, atau kegiatan tersebut (Apandi & Nasution, 2022).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memberikan arahan mengenai tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan aset tetap daerah, serta membantu pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Meskipun SAP memberikan panduan, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas untuk mengembangkan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka. Tiap daerah mungkin memiliki kebijakan akuntansi yang beragam, termasuk dalam hal pengenalan, pengukuran, penilaian, penyajian, dan pengungkapan aset tetap (R. Anggraini, 2018) dalam jurnal (Hulopi et al., 2021).

Dalam PSAP No.07 mengenai akuntansi Aset Tetap, yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010, diatur bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Hal ini juga terkait dengan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang mendefinisikan keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat

dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang menjadi milik daerah terkait dengan hak dan kewajiban tersebut (Ayu Berahima et al., 2022).

Manajemen aset daerah harus dikelola dengan cermat agar dapat dijadikan sebagai modal awal untuk meningkatkan kapabilitas keuangan pemerintah daerah. Jika aset tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi beban finansial karena sebagian aset memerlukan biaya perawatan atau pemeliharaan, dan nilai aset tersebut akan menurun (mengalami depresiasi) seiring berjalannya waktu,(Agency, 2023).

Selain memiliki nilai yang signifikan dalam laporan keuangan, aset tetap juga berguna untuk membantu pemerintah dalam menjalankan kegiatan operasional demi melayani masyarakat. Ini menunjukkan bahwa aset tetap memiliki peran penting yang harus dikelola dan dijaga dengan baik. Salah satu upaya untuk menjaga aset tetap adalah dengan menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Sebagaimana disebutkan dalam PP No 60 Tahun 2008, "pengamanan aset negara merupakan salah satu tujuan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (Deiana Suherlan et al., 2022).

Pemerintah daerah, termasuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi, memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola aset-asetnya dengan efektif. Aset-aset ini mencakup infrastruktur fisik seperti gedung dan fasilitas industri.

Namun, pengelolaan aset tetap bukanlah tugas yang mudah. Berbagai kompleksitas terkait dengan akuisisi, pemeliharaan, dan penghapusan aset tetap seringkali menjadi tantangan bagi organisasi. Untuk mengatasi tantangan ini, penerapan sistem dan prosedur akuntansi yang efektif menjadi suatu keharusan. Sistem dan prosedur yang baik tidak hanya memastikan pencatatan yang akurat dari aset tetap, tetapi juga memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat dan efisien terkait dengan aset tersebut Kabupaten Sukabumi, sebagai salah satu wilayah dengan potensi perdagangan dan industri yang besar, menghadapi tantangan yang unik dalam pengelolaan aset tetap di Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Dalam konteks pemerintahan, pengelolaan aset tetap yang baik adalah faktor penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan. Aset tetap seperti gedung, peralatan, dan kendaraan harus dicatat dan dikelola dengan baik untuk memberikan gambaran yang akurat tentang kekayaan dan sumber daya instansi pemerintah. Di Indonesia, banyak dinas pemerintah, termasuk Dinas Perdagangan Kabupaten Sukabumi, menghadapi tantangan dalam menerapkan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap yang efektif.

Dinas Perdagangan Kabupaten Sukabumi memiliki berbagai aset tetap yang perlu dikelola dengan baik untuk mendukung operasional dan pelayanan publik. Namun, seringkali ada kendala dalam pencatatan dan pelaporan aset tetap, seperti ketidakakuratan data, kurangnya pemeliharaan aset, dan prosedur yang tidak efisien. Hal ini dapat menyebabkan inefisiensi dalam penggunaan aset dan potensi kesalahan dalam laporan keuangan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap kinerja dinas tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang bertanggung jawab mengenai pengelolaan aset

bahwa masih terdapat beberapa masalah, dalam pelaksanaan kontrak pembelian aset, seringkali terjadi berbagai kendala yang dapat menghambat proses transaksi. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah ketidaksesuaian harga yang berlaku di pasaran dengan perencanaan anggaran. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dan dapat mempengaruhi anggaran yang telah direncanakan. Selain itu, terdapat juga masalah terkait ketersediaan barang. Barang yang sudah dicantumkan atau tercatat dalam kontrak seringkali tidak ditemukan saat diperlukan. Penyebab utama dari masalah ini adalah hilangnya barang karena pencurian atau perpindahan Dinas tanpa adanya pencatatan yang akurat. Kejadian ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan inventarisasi aset. Permasalahan lain juga adalah ketidaksesuaian dokumen perizinan. Dalam beberapa kasus, surat izin yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Izin mendirikan bangunan seharusnya sudah diperoleh sebelum proses Pembangunan dilakukan. Ketidakpatuhan terhadap prosedur ini dapat menimbulkan masalah hukum dan administrative di kemudian hari.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap di Dinas Perdagangan Kabupaten Sukabumi. Penelitian akan mengevaluasi sejauh mana sistem yang ada dapat mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan aset tetap dengan akurat dan efisien. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan sistem tersebut serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Efektivitas**

Menurut Mahmudi (2010:143) dalam jurnal (Lamia et al., 2019) efektivitas merujuk pada hubungan antara hasil atau keluaran dengan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Dalam konteks ini, suatu proses atau kegiatan dianggap efektif apabila mampu mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan dengan baik, atau dengan kata lain, menggunakan sumber daya dengan bijak. Tingkat efektivitas suatu unit organisasi dapat diukur dari seberapa besar hasil yang diperoleh dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Semakin besar kontribusi hasil terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan, semakin efektif pula proses kerja unit organisasi tersebut.

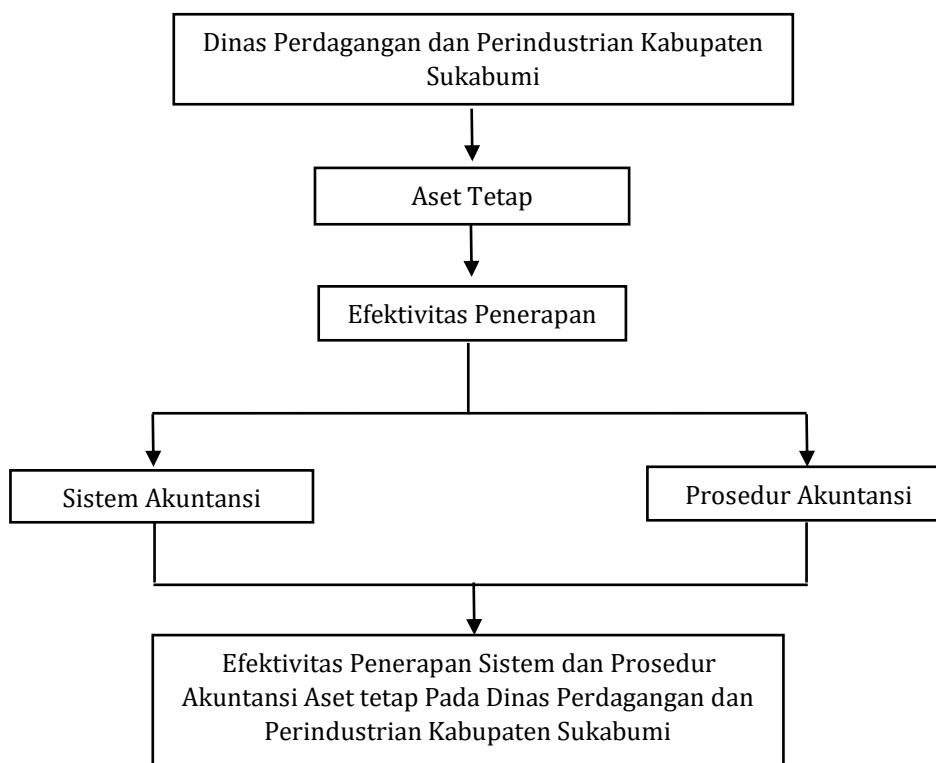
### **Prosedur Akuntansi**

Prosedur akuntansi aset mencakup serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan aset, hingga pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan aset yang dikelola atau digunakan oleh SKPD dan/atau SKPKD. Sistem akuntansi aset merupakan serangkaian metode dan prosedur yang digunakan untuk merekam dan mengkomunikasikan informasi mengenai aset bagi perusahaan atau organisasi tertentu. Ini melibatkan penggunaan dokumen pendukung transaksi, alat pencatatan, dan pembuatan laporan atas transaksi yang terjadi. Dalam beberapa sumber, prosedur akuntansi aset tetap juga meliputi pengelolaan aset tetap yang tidak termasuk

dalam definisi aset tetap, seperti aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan dan perlengkapan (Tangkuman & Mulalinda, 2019).

## Aset Tetap

Menurut (Triharta, 2013) Aset tetap dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No.7 adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sedangkan menurut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022) Dalam PSAK 216 aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk administratif; dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.



**Gambar 1. Kerangka pemikiran**

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini memiliki tiga elemen *social situation* yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi (*place*), Departemen Keuangan dan Pengelolaan Aset (*Actors*), dan Menganalisa Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi (*Activities*). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian

ini adalah analisis data sebelum di lapangan dan analisis data setelah dan selama di lapangan dan Analisis Efektivitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

Dalam rangka menilai seberapa efektif nya Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi sebagaimana diatur dalam Permendagri No.19 Tahun 2016 dan PSAP No.7 Tahun 2010 tentang pedoman akuntansi aset tetap. Berikut Tabel Indikator Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap : Tabel di bawah ini merupakan skala penilaian dan predikat tingkat kualitas pengelolaan BMD.

**Tabel 1. skala penilaian kualitas pengelolaan BMD**

Skor	Penjelasan
Nol (0)	Jawaban Tidak Sesuai
Satu (1)	Jawaban Sesuai

**Tabel 2. Indikator Sistem Akuntansi Aset tetap**

No	Indikator Sistem Akuntansi Aset Tetap (sesuai dengan Permendagri No 19 Tahun 2016 Tentang Akuntansi Aset Tetap)	Skor
1	Sistem perencanaan kebutuhan dan penganggaran	1
2	Sistem pengadaan	1
3	Sistem penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran	1
4	Sistem inventarisasi	1
5	Sistem penggunaan	1
6	Sistem pemeliharaan	0
7	Sistem penilaian	0
8	Sistem pemindahtanganan	1
9	Sistem penghapusan	1
10	Sistem pelaporan	1
11	Sistem pengawasan dan pengendalian	1
	<b>Total Indikator Terpenuhi Dari 11</b>	<b>9</b>

**Tabel 3. Indikator Prosedur Akuntansi Aset Tetap**

No	Indikator Prosedur Akuntansi Aset Tetap (sesuai dengan PSAP No.7 Tahun 2010 Tentang Akuntansi Aset Tetap)	Skor
----	--	------

1	Pengakuan aset tetap	1
2	Pengukuran aset tetap	1
3	Penyusutan aset tetap	1
4	Penurunan nilai aset tetap	1
5	Pelepasan dan penghentian	1
6	pengungkapan	1
7	Pelaporan aset tetap	1
	<b>Total Indikator terpenuhi dari 7</b>	<b>7</b>

Sumber: Data diolah oleh peneliti 2024

## Analisis Efektivitas

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, maka dapat dihitung nilai kesesuaian menggunakan alat ukur Dean J. Champion dalam dalam (Intan Kusumawardany, 2024) yaitu perhitungan dilaksanakan dengan menghitung jumlah jawaban “sesuai” untuk menentukan besaran rasio efektivitas terhadap BMD Kabupaten Sukabumi dengan dilaksanakan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Total jawaban sesuai}}{\text{Total Perbandingan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{16}{18} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektivitas} = 88\%$$

Dari hasil perhitungan diatas, maka pengukuran aset tetap telah sesuai dengan tingkat kesesuaian 88% kriteria sangat efektif menurut Dean J. Champion dalam (Intan Kusumawardany, 2024) dalam Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi.

## PEMBAHASAN

### Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi

Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi dinilai sudah efektif dan akurat dalam mencatat serta melaporkan aset. Meskipun ada beberapa kendala kecil yang masih bisa diatasi, penerapan sistem ini sangat membantu dalam pembuatan laporan bulanan. Evaluasi berkala dilakukan melalui rapat bulanan dan audit internal untuk memastikan sistem dan prosedur tetap efektif.

Sistem atau aplikasi yang digunakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten sukabumi yaitu aplikasi Simda BMD (*Barang Milik Daerah*).



**Gambar 2. Aplikasi SIMDA BMD**

## **Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap**

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, faktor-faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap meliputi validitas data, sumber daya manusia, teknologi, kebijakan, dan regulasi pemerintah. Validitas data yang dicatat menjadi faktor utama dalam menentukan efektivitas sistem, karena memastikan informasi aset yang disajikan tepat dan dapat diandalkan. Meskipun sumber daya manusia sudah memadai, pelatihan tambahan untuk staf akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka. Teknologi yang digunakan mendukung penerapan sistem dengan baik, memastikan bahwa sistem akuntansi aset tetap berjalan lancar dan efisien. Selain itu, kebijakan dan regulasi pemerintah sangat membantu dalam menyediakan informasi aset yang transparan dan akurat. Ketersediaan dana dan anggaran, di sisi lain, tidak mempengaruhi penerapan sistem ini, menunjukkan bahwa faktor tersebut tidak berpengaruh terhadap efektivitas sistem.

## **Eksplorasi kendala-kendala yang dihadapi dalam Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi**

Dalam penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi, kendala utama yang dihadapi adalah masalah sinkronisasi data. Sinkronisasi data yang tidak tepat dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam pencatatan dan pelaporan aset, yang pada gilirannya mempengaruhi keandalan laporan keuangan dan pengelolaan aset. Meskipun sistem dan prosedur telah diterapkan

dengan baik, ketidaksesuaian data yang tercatat dapat mengakibatkan informasi yang tidak konsisten, menghambat efisiensi dan efektivitas sistem akuntansi.

Pelatihan dan kompetensi staf, meskipun sudah dianggap memadai dan mudah dipahami, tetap memerlukan perhatian. Penguasaan sistem oleh staf sangat penting untuk memastikan bahwa semua prosedur akuntansi diikuti dengan benar dan data dicatat secara akurat. Dengan demikian, pelatihan yang berkelanjutan dan pembaruan pengetahuan mengenai sistem dapat membantu meminimalkan kesalahan yang mungkin terjadi akibat kurangnya pemahaman atau kekurangan keterampilan.

Tidak ada kendala teknis yang signifikan dalam penggunaan perangkat lunak akuntansi, dan koordinasi antar departemen berjalan dengan lancar, menunjukkan bahwa aspek teknis dan komunikasi antar unit cukup baik. Namun, kendala dalam dokumentasi dan pencatatan aset tetap dapat diatasi melalui koordinasi yang baik antar bidang. Dengan adanya upaya koordinasi yang efektif, masalah-masalah terkait dokumentasi dan pencatatan dapat diatasi, memungkinkan sistem akuntansi aset tetap berfungsi dengan lebih optimal dan akurat.

## **Dampak Dari Kurang Efektifnya Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Terhadap Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian**

Kurangnya efektivitas dalam sistem akuntansi aset tetap dapat mengakibatkan laporan keuangan yang kurang akurat dan tidak dapat diandalkan. Ketidakkuratan dalam pencatatan aset tetap menyebabkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, yang berpotensi menyesatkan pengguna laporan, seperti manajer, auditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan keputusan yang kurang tepat dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan serta mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas laporan keuangan.

Selain itu, ketidakkuratan dalam pencatatan aset tetap mengurangi transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Informasi aset yang tidak akurat dapat menyembunyikan kondisi sebenarnya dari aset yang dimiliki dan bagaimana aset tersebut digunakan. Ini mengurangi kemampuan pihak-pihak terkait untuk melakukan evaluasi yang tepat terhadap efisiensi dan efektivitas penggunaan aset, serta menghambat pengawasan yang efektif.

Masalah utama dalam pengendalian internal terkait dengan sistem akuntansi aset tetap adalah dokumen pengadaan yang kurang lengkap. Dokumen yang tidak lengkap dapat menyebabkan ketidakkuratan dalam pencatatan dan pengelolaan aset, serta kesulitan dalam melacak dan memverifikasi keberadaan dan status aset. Hal ini dapat mengurangi efektivitas pengendalian internal, meningkatkan risiko kehilangan atau penyalahgunaan aset, dan menurunkan kemampuan dinas untuk melakukan audit dan pelaporan yang akurat.

Perbaikan sistem akuntansi aset tetap dinilai sangat penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan pengendalian internal. Dengan memperbaiki sistem, seperti memperkuat prosedur pencatatan dan dokumentasi, serta memastikan data yang lebih akurat dan transparan, dinas akan dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih andal

dan meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Ini akan membantu dalam meningkatkan akurasi laporan keuangan, memperkuat transparansi, dan memastikan bahwa pengendalian internal dapat mendeteksi dan mencegah potensi masalah dengan lebih baik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan dapat ditarik sebagai berikut:

**Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi tergolong sangat efektif. Berdasarkan indikator-indikator yang dinilai, rasio efektivitas mencapai 88%, yang masuk dalam kategori sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa dinas tersebut telah menerapkan prosedur yang sesuai dengan PSAP No. 07 Tahun 2010 dalam hal pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan penghentian aset tetap.

**Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan:** Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi telah berhasil memenuhi sebagian besar indikator yang dinilai dalam penelitian ini. Dari 11 indikator sistem akuntansi aset tetap, dinas ini berhasil memenuhi 9 indikator dengan skor total 9 dari 11. Sedangkan untuk indikator prosedur akuntansi aset tetap, semua 7 indikator dipenuhi dengan skor total 7 dari 7. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan dan standar yang berlaku.

**Kendala dalam Dokumentasi dan Pencatatan:** Meskipun penerapan sistem dan prosedur secara umum sangat efektif, terdapat kendala dalam dokumentasi dan pencatatan aset tetap. Kendala ini terutama disebabkan oleh kurangnya kelengkapan dokumen pengadaan, yang dapat mempengaruhi akurasi dan keandalan pencatatan aset tetap.

**Dampak Terhadap Laporan Keuangan:** Kurangnya kelengkapan dalam dokumentasi pengadaan aset tetap berdampak negatif terhadap laporan keuangan. Ketidakakuratan dalam pencatatan aset tetap menyebabkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya, yang berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap laporan keuangan dinas.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, saran bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya dapat menambah atau menggunakan teori-teori baru dalam penelitian yang akan datang, sehingga teori yang digunakan lebih relevan dan dapat mengikuti perkembangan zaman, dapat menggunakan Teknik penelitian yang berbeda dalam penelitian berikutnya agar hasilnya lebih bervariasi dan akurat serta dapat memperluas subjek penelitian untuk membuat temuan yang lebih umum.

## DAFTAR PUSTAKA

Agency, M. (2023). *JURNAL KOLABORATIF SAINS VOLUME 6 ISSUE 11 NOVEMBER 2023 Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala The Effectiveness Implementation of Fixed Asset Accounting Systems a. 6(11), 1478-1485. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i11.4311>*

- Apandi, A., & Nasution, N. (2022). Peran Audit Internal terhadap Efektivitas Pengendalian Intern Perolehan Aset Tetap (Studi Kasus BPRS Harta Insan Karimah Bekasi). *Jurnal Akuntansi STEI Volume*, 05(02), 1–8.
- Ayu Berahima, D., Sondakh, J., Lambey, R., Akuntansi, J., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2022). *Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Evaluation Of The Implementation Of The Government Accounting Standard No. 07 Concerning Accounting Of Fixed Assets At The One Door*. 5(2), 1073–1078.
- Deiana Suherlan, Mulyandani, V. C., & Citra, V. (2022). Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Pengamanan Aset Tetap (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bekasi). *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 258–264. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.4131>
- Hulopi, A. K., Tuli, H., & Usman. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Koperasi di Kota Gorontalo. *Jambura Accounting Review*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.37905/jar.v2i1.20>
- Intan Kusumawardany. (2024). Efektivitas Sistem dan Prosedur Pengelolaan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok. *Journal of Business Innovation and Accounting Research*, 1(2), 133–154. <https://doi.org/10.56442/zbsaz19>
- Kurniasari, N. S. (2019). *Sistem Akuntansi Pengadaan Aset Tetap Pada Yayasan Sabiilus Salam*. 11, 1–16.
- Lamia, A. A., Saerang, D. P. E., & Heinze, R. N. W. (2019). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(05), 788–799.
- Martini, R., Sriwijaya, P. N., Sueb, M., Padjajaran, U., Hidayat, N., Indonesia, U. P., Fuadah, L., Sriwijaya, U., Widarsono, A., Indonesia, U. P., Tadulako, U., Winarno, W. W., Akuntansi, J., Negeri, P., Akuntansi, J., & Negeri, P. (2019). *J r t a*. 3, 7.
- Sistem, A., Prosedur, D. A. N., Aset, A., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2020). Analisis Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Di Dinas Perhubungan Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 1186–1195.
- Sukabumi, P. K. (2017). peraturan daerah kabupaten sukabumi. In *Occupational Medicine* (Vol. 53, Issue 4).
- Tangkuman, S., & Mulalinda, V. (2019). Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro. *Jurnal Riset Ekonomi*, 2(1), 521–531. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/4169>
- Triharta, A. B. (2013). *sistem akuntansi pemerintahan basis akrual dengan entri berpasangan*.